



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN  
DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**  
(Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam , Fatwa MUI No.: 11  
Tahun 2012 dengan Keputusan MK No.: 46/PUU-VIII/2010 )

**TESIS**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Syariah  
pada Program Studi Perdata Islam  
Konsentrasi Hukum Perdata Islam**



**Oleh:**

**IBNUL MUBAROK  
NIM : 14116410001**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON  
2013**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

## LEMBAR PENGESAHAN

### TESIS

#### KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

( Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam , Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012  
dengan Keputusan MK No.: 46/PUU-VIII/2010 )

Disusun oleh:

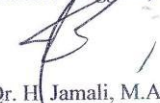
**IBNUL MUBAROK**  
**NIM. 14116410001**

Telah Diujikan pada Tanggal 4 September 2013  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Syariah

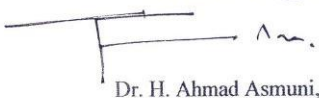
Cirebon, 4 September 2013

#### Dewan Penguji

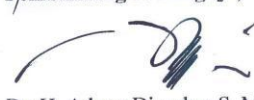
Ketua / Anggota,

  
Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag

Sekretaris / Anggota,

  
Dr. H. Ahmad Asmuni, MA


Pembimbing I / Penguji ,

  
Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag

Pembimbing II / Penguji ,


  
Dr. H. Kosim, M.Ag

#### Penguji Utama,

  
Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag

Direktur,



  
Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.  
NIP. 19680408 199403 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRAK

**IBNUL MUBAROK: “Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)”**

Hukum Islam yang selama ini dipahami secara umum, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 lebih menekankan dan mementingkan pengakuan biologis semata. Kedudukan anak hasil zina kini menjadi sama dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap melegalkan hubungan di luar nikah tanpa mengkhawatirkan masa depan anak. Persepsi tersebut terbentuk karena walau tidak terikat perkawinan, anak hasil hubungan zina tetap memiliki hak nafkah, nasab, perwalian nikah, dan waris.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut kompilasi hukum Islam ( MKHI ) dan undang-undang perkawinan ( UUP )? Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut putusan MK: 46/PUU-VIII/2010? Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012? Bagaimana hasil analisis komparasi kedudukan anak di luar perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dengan Putusan MK. : 46/PUU-VIII/2010?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut KHI dan undang-undang perkawinan, kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut putusan MK: 46/PUU-VIII/2010, kedudukan hukum anak di luar perkawinan menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan komparasi kedudukan anak di luar perkawinan antara KHI dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dengan Putusan MK.No.: : 46/PUU-VIII/2010.

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif, bersifat kepustakaan deskriptif-analisis. Penulis berupaya mengungkapkan kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia menurut fatwa MUI No. 11 tahun 2012 dengan MK No 46/PUU-VIII/2010. Di samping itu, penulis berupaya mengumpulkan data yang menyangkut konsep MUI dan MK tentang kedudukan anak di luar perkawinan yang terdiri dari data tulisan-tulisan mereka, baik dalam karya-karya yang telah dibukukan maupun yang masih berserakan di internet.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut KHI, UU Perkawinan dan fatwa MUI , anak di luar nikah (anak zina) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun Mahkamah Konstitusi ( MK) mengakui anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah, berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, syaratnya dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

teknologi, seperti melalui hasil tes DNA. Namun keputusan MK tersebut belum dilaksanakan karena berbenturan dengan KHI, UU Perkawinan dan fatwa MUI.

## ABSTRACT

**IBNUL MUBAROK:** *"Dimiciling extramarital Child in Conjugal Right in Indonesia (Komparasi between Kompilasi Law Islam, Religious advices of MUI No. 11 Year 2012 with MK No 46/PUU-VIII/2010)"*  
NIM.: 14116410001

Law Islam is which during the time comprehended in general, authenticity an marriage very is determining of legal status of borne children. But Lawcourt Constitution in Decision Number 46/PUU-VIII/2010 more emphasizing and making account of confession of eye biologists. Dimiciling child result of adultery nowadays become is equal to child which born from valid marriage relation. Hence, that Lawcourt Constitution decision is assumed is legal of relation outside marrying without feeling concerned about child future. The perception formed by because although is unattached of marriage, child result of adultery relation remain to have maintenace rights, lineage, trusteeship do, marry and heir.

The research problem is how the legal status of children born outside of marriage according to Islamic law and the compilation of the laws of marriage? How the legal status of children born out of wedlock by MUI fatwa. 11 In 2012? How comparative study analyzes the position of the child outside of marriage between Islamic law and the compilation of the MUI fatwa No. 11 of 2012 with the decision of the Court: 46/PUU-VIII/2010?

The purpose of this study was to determine the legal status of children born outside of marriage according to Islamic law and the compilation of marriage law, to determine the legal status of children born out of wedlock by MUI fatwa. 11 of 2012 and the comparative study analyzes the position of the child outside of marriage between a compilation of Islamic law, the MUI fatwa No. 11 of 2012 with the decision of the Court: 46/PUU-VIII/2010.

This study is a qualitative research, literature is descriptive-analytical.. Writer cope to lay open to domicile extramarital child in Islam marriage law in Indonesia according to religious advices of MUI No. 11 year 2012 with MK No 46/PUU-VIII/2010. Despitefully, writer cope to collect data which concerning concept of MUI and of MK about dimiciling extramarital child consisting of their articles data, goodness in masterpieces which have been booked and also which still scatter in internet.

This study concludes that by KHI, the Law Marriage and religious advices of MUI, child outside marrying (adultery child) only owning civil relation with its mother and its mother family. As for Lawcourt Constitution differ opinion, MK confess external child marry (result of biologists) as born in wedlock, meaning will have heir relation with its father of him is without having to





preceded with authentication and confession, on condition that can be proved by the existence of relation of biologi between father and child of biologi pursuant to and science of teknologi, for example passing result of DNA tes. But its implementation of uncommitted field because impinging with KHI and of UU marriage and religious advices of MUI.

## المخلص

**ابن المبارك " :الطفل المركز خارج إطار الزواج في قانون الزواج في اندونيسيا) مقارنة بين جميع الشريعة الإسلامية، الفتوى مجلس العلماء إندونيسيا عدد ١١ عم ٢٠١٢ إلى المحكمة الدستورية رقم ٤٦/PUU-VIII/٢٠١٠"**

وقد فهم الشريعة الإسلامية بشكل عام، وصحة الزواج بتحديد الوضع القانوني للأطفال المولودين . ولكن المحكمة الدستورية في القرار رقم ٤٦/PUU-VIII/٢٠١٠ أكثر شدد والمعنية مع الاعتراف البيولوجية فقط .أصبح موقف الطفل من الزنا نفس الطفل المولود من علاقة الزواج الشرعي .ولذلك، فإن قرار المحكمة الدستورية يعتبر تقنين العلاقات خارج نطاق الزواج دون الحاجة إلى القلق حول مستقبل الطفل .تشكل هذه التصورات لأنه على الرغم يست ملزمة الزواج، طفل من علاقة الزنا يحتفظ المعيشة الحق، النسب والوصاية والزواج، والميراث.

مشكلة البحث هو كيف الوضع القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج وفقا للشريعة الإسلامية وتجميع لقوانين الزواج؟ كيف الوضع القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج وفقا لفتوى مجلس العلماء إندونيسيا عدد ١١ عم ٢٠١٢ ؟ كيف يحل دراسة مقارنة لوضع الطفل خارج إطار الزواج بين الشريعة الإسلامية وفتوى مجلس العلماء مصنفاً إندونيسيا رقم ١١ سنة ٢٠١٢ مع قرار المحكمة :رقم ٤٦/PUU-VIII/٢٠١٠ ؟ كيف يمكن للتحليل الدراسات المقارنة في الطفل واقفا خارج الزواج بين الشريعة الإسلامية وتجميع الفتوى مجلس العلماء إندونيسيا رقم 1 ١١ سنة ٢٠١٢ إلى المحكمة الدستورية رقم ٤٦/PUU-VIII/٢٠١٠ ؟

وكان الغرض من هذه الدراسة لتحديد الوضع القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج وفقا للشريعة الإسلامية وتجميع قانون الزواج، لتحديد الوضع القانوني للأطفال المولودين خارج إطار الزواج من قبل مجلس العلماء اندونيسيا رقم الفتوى عدد ١١ عم ٢٠١٢ ويحل دراسة مقارنة لوضع الطفل خارج إطار الزواج بين مجموعة من الشريعة الإسلامية، فتوى مجلس العلماء إندونيسيا رقم ١١ سنة ٢٠١٢ مع قرار المحكمة :رقم ٤٦/PUU-VIII/٢٠١٠ ودراسة مقارنة لموقف لطفل خارج إطار الزواج بين مجموعة القوانين الإسلامية والفتوى مجلس العلماء إندونيسيا رقم ١١ سنة ٢٠١٢ مع المحكمة الدستورية . رقم ٤٦/PUU-VIII/٢٠١٠

وفقا هذه الدراسة، فإن الأبحاث التي أجريت مع البحث في المكتبة ( مكتبة البحوث )يسعى المؤلف للكشف عن موقف طفل خارج إطار الزواج في الزواج الشريعة الإسلامية في إندونيسيا من قبل العلماء الاندونيسي الفتوى رقم المجلس ١١ سنة ٢٠١٢ المحكمة الدستورية رقم ٤٦-PUU/VIII/٢٠١٠ .وبالإضافة إلى ذلك، يحاول واضعو لجمع البيانات المتعلقة مفهوم مجلس العلماء اندونيسيا ومحكمة للمكان من الأطفال خارج إطار الزواج التي تتكون من البيانات كتاباتهم، سواء في الأعمال التي تم تسجيلها والتي لا تزال منتشرة على شبكة الانترنت.

من البحوث التي تم القيام به، لم الأطفال خارج إطار الزواج ( الطفل الطبيعي )الذي لديه علاقة مدنية مع والدتها وعائلة والدتها فقط لا تختلف بين المملكة للاستثمارات الفندقية التفسير، وقانون الزواج والمجلس الفتوى العلماء إندونيسيا عدد ١١ سنة ٢٠١٢، والذي يختلف من قرار المحكمة الدستورية.



أقرت المحكمة الدستورية طفل غير شرعي ( النتائج البيولوجية ) وسوف وسيلة الأطفال الشرعيين لها علاقة مع الأب البيولوجي دون الورثة يجب أن يسبقه الاعتراف والموافقة عليها، شريطة أن يمكن إثبات وجود علاقة بيولوجية بين الطفل والأب البيولوجي يعتمد على العلم والتكنولوجيا، على سبيل المثال من خلال نتائج اختبار الحمض النووي.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala kehendak-Nya yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada terhitung, sehingga penyusunan tesis ini akhirnya dapat terselesaikan juga.. Shalawat dan salam disampaikan kepada Muhammad Rasulullah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang berjalan diatas risalahnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian dari tesis ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Maksum, MA. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag. Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Dr. H. Asmuni, MA. Asisten Direktur I program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. Dr. H. Atabik Luthfi, MA Ketua Program Studi Hukum Perdata Islam yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam aktivitas perkuliahan dari awal sampai akhir;
5. Prof. Dr. Adang Djumhur S., M.Ag. sebagai Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini;
6. Dr. H. Kosim, M.Ag. sebagai Pembimbing II dalam penyusunan tesis ini ;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. Rekan-rekan program Studi Hukum Perdata Islam yang banyak memberikan motivasi;
8. Rekan-rekan dilingkungan kerja KUA Kecamatan Losarang dan Krangkeng yang banyak memberikan dukungan;
9. Para Dosen dan Civitas Akademika program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
10. Semua pihak yang telah ikut berperan untuk membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak bisa membalas amal baik mereka, kecuali hanya bisa berdo'a semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Kemudian penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis berharap adanya pengembangan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya. Meski demikian, sebagai asa terakhir semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, Amin.

Cirebon, 4 September 2013

Penulis





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB – INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ط	Ta'	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	' (koma) terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	-	-
ل	Lam	-	-
م	Mim	-	-
ن	Nun	-	-
و	Wawu	-	-
ه	Ha'	-	-
ء	Hamzah	'	' (apostrof), tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya'	Y	-

### Catatan :

Bila secara teknis ada kesulitan dalam mengikuti pedoman tersebut, dapat dipilih alternatif lain, dengan catatan digunakan secara konsisten. Salah satu alternatifnya adalah pedoman di bawah ini :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ﺍ	A	ﺙ	th
ﺏ	B	ﺫ	zh
ﺕ	T	ﻉ	‘
ﺕﺱ	Ts	ﻎ	gh
ﺝ	J	ﻑ	f
ﺡ	<u>H</u>	ﻕ	q
ﻙ	Kh	ﻙ	k
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	n
ﺯ	Z	ﻭ	w
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﺀ	-
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﻝ	Dl	-	-

### Catatan :

1. â = a panjang
2. î = i panjang
3. û = u panjang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

4. Kata sandang alif + lam ( ال ) bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis *al*, contoh :  
الاسلام ditulis *al-Islam*. Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiyah*, seperti الرسالة ditulis *ar-Risalah*.
5. Nama orang, istilah hukum dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah. Shalat dan zakat.
6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh: ردة ditulis *riddah*.
7. *Ta' marbuthah* diakhir kata: bila dimatikan ditulis h, seperti: بدعة ditulis bid'ah; kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh: كرامة الأولياء ditulis *karamatu al auliya'i*.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## D A F T A R   I S I

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
<i>AL-MULAKHASH</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRASLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II : KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN</b>	
A. Hukum Perkawinan di Indonesia .....	26
B. Pengertian Anak di Luar Perkawinan Menurut KHI dan UU	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perkawinan.....	28
C. Pengertian dan Dasar Hukum .....	28
D. Akibat Hukum Anak di Luar Nikah dalam KHI.....	34
E. Kedudukan Anak Luar Kawin dalam KUHPdata .....	41
F. Kedudukan Hukum dan Hak Anak di Luar Perkawinan Menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan .....	43
<b>BAB III : KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MK NOMOR : 46/UU-VIII/2010</b>	
A. Peran dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Nasional serta Latar Belakang Lahirnya Putusan MK No : 46/PUU-VIII/2010 .....	45
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 .....	47
C. Pengertian Anak di Luar Perkawinan Menurut Keputusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 .....	54
D. Kedudukan Hukum dan Hak Anak di Luar Perkawinan Menurut Keputusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 .....	62
E. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 .....	65
F. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	68
<b>BAB IV : KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR : 11 TAHUN 2012</b>	
A. Pengertian Anak di Luar Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	81
1. Pengertian anak Luar Kawin dalam Islam . .....	81



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam .. ...	87
<b>B. Pengertian Nasab dan Dasar-Dasar Nasab Menurut Hukum</b>	
Islam .....	99
1. Pengertian Nasab .. .....	99
2. Dasar-Dasar Nasab .. .....	100
3. Batas Minimal Kehamilan .. .....	103
4. Batas Maksimal Kehamilan .. .....	107
<b>C. Pengertian Anak di Luar Perkawinan Menurut Fatwa MUI ...</b>	<b>116</b>
1. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam .. .....	116
2. Prosuder Penetapan Fatwa MUI .. .....	122
3. Hukum Anak Hasil Zina Menurut MUI .. .....	124
4. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 .. .....	126
<b>D. Ketentuan dan Dasar Hukum Mengenai Anak Hasil Zina .....</b>	<b>127</b>
<b>BAB V : KOMPARASI KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF KHI, PUTUSAN MK DAN FATWA MUI</b>	
A. Analisis Perspektif UU Perkawinan dan KHI .....	132
B. Analisis Perspektif Putusan MK .....	133
C. Analisis Perspektif Fatwa MUI .....	153
D. Teori <i>Maqâshid as-Syari'ah</i> .....	154
E. Teori Konstitusi dan Teori Perundang-undangan .....	157
<b>BAB VI : KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	166
B. Saran .....	170



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>172</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan budaya yang semakin pesat, pola perilaku di tengah masyarakat pun semakin banyak mengalami perubahan. Hal itu ditambah lagi dengan semakin maju dan canggihnya teknologi informasi. Media-media yang mengandung unsur pornografi semakin mudah diakses oleh banyak orang. Fenomena seperti itu pula yang barangkali melatarbelakangi timbulnya banyak kasus kelahiran anak di luar perkawinan yang sah.

Padahal menurut hukum Islam yang selama ini dipahami secara umum, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang dilahirkan. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 lebih menekankan dan mementingkan pengakuan biologis semata. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Berdasarkan uraian tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedural/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, menurut Mahkamah Konstitusi (MK), maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, hlm.35



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Adapun dalam perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 Ayat (1) dinyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan, “Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.<sup>2</sup>

Demikian juga pada Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesai Nomor 1 tahun 1991, Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 100 dinyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>3</sup>

Akibat dari lahirnya keputusan revolusioner<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Ulama Indonesia ( MUI) menolak putusan MK dengan mengeluarkan Fatwa nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Penolakan itu karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seolah-olah melegalisasi perzinahan. Dengan putusan itu pula, anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa didasari ikatan perkawinan yang

---

<sup>2</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonsia Tahun 2009, hlm.28. Selanjutnya disebut *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*.

<sup>3</sup> Di sini perbedaannya hanya kata “hubungan perdata” diganti dengan “hubungan nasab”, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*,, hlm. 257.

<sup>4</sup> Dikatakan keputusan revolusioner karena selama ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anak yang sah yang mempunyai hubungan hukum -baik perdata maupun nasab-- adalah *pertama* harus diabsahkan dengan akad nikah (perkawinan); *kedua* perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama bagi yang muslim dan di Catatan Sipil bagi non muslim. Sementara menurut keputusan MK tersebut, hanya melalui tes darah semacam tes genetik DNA, anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, ibu biologisnya, keluarga ayah biologisnya, dan keluarga ibu biologisnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>5</sup>-- adalah tetap diakui sebagaimana anak yang sah.<sup>6</sup>

Fatwa tersebut bertujuan menepis berbagai *syubuhah* (kerancuan) di tengah umat Islam. Hal itu karena fatwa tersebut menyatakan dengan tegas kedudukan anak hasil zina dalam Islam, sehingga tak perlu ragu lagi berpegang terhadap aturan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang lain yang dibuat manusia. MUI juga meminta kepada MK untuk menganulir putusannya tersebut. Substansi dari fatwa tersebut adalah: *pertama*, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya; *kedua*, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya; *ketiga*, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa kedudukan anak hasil zina kini menjadi sama dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap melegalkan hubungan di luar nikah tanpa mengkhawatirkan masa depan anak. Persepsi tersebut terbentuk karena walau tidak terikat perkawinan, anak hasil hubungan zina tetap memiliki hak nafkah, nasab, perwalian nikah, dan waris.

---

<sup>5</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm. 124

<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 dan Pasal 99 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kriteria yang sama untuk anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, hlm. 123



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Putusan MK yang diumumkan pada 17 Februari 2012 memiliki konsekuensi yang sangat luas, yaitu mengesahkan hubungan nasab, waris, wali dan nafkah antara anak hasil zina dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Bila anak hasil zina sederajat dengan anak hasil perkawinan yang sah secara agama, maka fungsi lembaga perkawinan jadi tidak berwibawa. Hal ini merupakan pintu untuk membuka perzinaan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat perbedaan perspektif dalam menentukan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara keputusan Mahkamah Konstitusi di satu pihak dan fatwa Majelis Ulama Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam, di pihak lain . Oleh karena itu, menarik untuk dikaji dan dianalisis alasan-alasan atau dalil-dalil hukum dari masing-masing pihak. Tesis ini akan melakukan studi perbandingan antara keputusan Mahkamah Konstitusi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam , dengan judul : "*Kedudukan Anak di luar Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Komparasi antara Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:





- a. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ?
- b. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 46/PUU-VIII/2010 ?
- c. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 ?
- d. Bagaimana hasil analisis studi komparasi kedudukan anak di luar perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 dengan putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010 ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
- b. Untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut putusan MK nomor: 46/PUU-VIII/2010
- c. Untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut fatwa MUI no. 11 tahun 2012
- d. Untuk menganalisis komparasi kedudukan anak di luar perkawinan antara kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 dengan putusan MK nomor : 46/PUU-VIII/2010



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Indonesia dalam memperjelas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimbas juga pada anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Terhadap kelompok anak luar kawin ini, maka pemberlakuan aturan hukum harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan konteks hukum yang berlaku (*the living law*). Sehingga pelaksanaan putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, belum pernah dilakukan penelitian dengan judul “kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia (Komparasi perspektif Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 Tahun 2012) dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 . Dengan demikian, penelitian ini adalah asli. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah :

- a. Tesis yang berjudul “Konsep Itsbat Nikah dalam Pernikahan Sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” Tesis ini disusun pada Tahun 2011 oleh Masrukhin, Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati. Adapun masalah yang diteliti ialah: Bagaimana Konsep Itsbat Nikah dalam Pernikahan Sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Hasil



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

penelitian ini menyimpulkan Pernikahan Sirri merupakan Perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Namun pernikahan Sirri dapat disahkan dengan cara mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Relevansinya dengan penelitian ini, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” dapat juga ditafsirkan sebagai anak yang dilahirkan melalui perkawinan sirri, dan dapat disahkan dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

- b. Buku *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Buku ini merupakan tesis yang dijadikan buku karya H. Mukhlisin Muzarie Tahun 2002. Adapun masalah yang diteliti ialah: a) Bagaimana status Perkawinan wanita yang hamil dari zina atau hubungan luar nikah? b) Bagaimana Hukum persebadanan antar keduanya? c) Bagaimana status anak yang dilahirkan dan hak untuk dinasabkan kepada ibu dan bapaknya?
- c. Tesis berjudul “ *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia: Tinjauan terhadap Pasal-Pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaanya*”. Dalam hal ini, penulisnya mengkaji dan menelaah beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), karena ada beberapa pasal yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan hak asasi manusia. Beberapa pasal yang menjadi bidikannya adalah perkawinan antar agama, poligami, hak dan kewajiban suami-isteri, dan putusnya perceraian beserta akibat hukumnya.



## E. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>7</sup> Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Artinya, mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>8</sup>

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori hukum Islam *maqāshid as-syari'ah*, teori Konstitusi dan teori peundang-undangan.

### 1. Teori Tujuan Hukum Islam (*maqāshid as-syari'ah*)

Dalam khazanah hukum Islam, Imam asy-Syathibi mengembangkan teori tujuan hukum (*maqāshid as-syari'ah*) dalam karyanya *al-muwafaqat*.<sup>9</sup> Secara etimologi, kata *maqāshid as-syari'ah* dari *qasada* berarti tujuan, sedangkan *as-syari'ah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti “jalan yang harus diikuti”. Kata *as-syari'ah* secara harfiah berarti “jalan menuju sumber mata air”.<sup>10</sup> *Syariah* secara langsung berasal dari perintah Allah. Namun demikian, di dalam memahami *syariah* ini ada sedikit bagian campur tangan yang diberikan kepada manusia untuk

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

<sup>8</sup> Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 6.

<sup>9</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut : Dar al-Ma'arif, 1975), III, hlm. 6

<sup>10</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 3.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

menafsirkan dan menjabarkan perintah Allah dengan metode dedukasi analogis (*qiyas*) maupun dengan metode lain.<sup>11</sup>

Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 105:<sup>12</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا



*“Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena membela orang-orang yang khianat”*

Dan sabda Rasulullah SAW:

*“Aku telah meninggalkan untukmu sekalian dua hal. Apabila engkau semua berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Dua hal itu adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya (H.R. Bukhari dan Muslim)*

Dari ketentuan di atas, sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an al-Karîm, dan sumber utama kedua yaitu Sunnah Rasulullah SAW, adapun yang ketiga yaitu *Ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *Qiyas* (dedukasi analogi). Melalui proses inilah, syariat bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dan sesama manusia alam dan lingkungannya.

Tujuan *Syar'i* dalam pembentukan hukumnya adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhannya.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 139 , selanjutnya disebut Al-Qur'an dan Terjemahnya.



Menurut Nukman Sulaiman, ada tiga tingkatan kepentingan kebutuhan manusia,<sup>13</sup> yaitu:

- a. Kepentingan yang sangat mendasar (prinsipil) sekali, disebut dengan kepentingan *ad-dharûriyyah*, yang meliputi yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, nasab (keturunan).
- b. Kepentingan yang sangat dihajatkan, disebutkan kepentingan *hâjiyyah* yaitu perkara yang sangat dihajatkan manusia, tetapi tidak lah sampai membahayakan, seandainya perkara itu tidak dipenuhi, seperti bahaya yang timbul karena tidak terpeliharanya perkara *ad-dharûriyyah*.
- c. Kepentingan yang sangat diperlukan (untuk penyempurnaan kepentingan *ad-dharûriyyah* dan *hâjiyyah*.) yaitu *tahsiniyyah*.

*ad-Dharûriyyah* adalah kebutuhan pokok yang harus terjamin dan terlindungi dalam kehidupan manusia di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Dalam wacana syariat Islam, *ad-dharûriyyah* yang harus dilindungi atau dipelihara kemaslahatannya, yaitu meliputi: *agama, jiwa, akal, keturunan dan harta*. Apabila tidak terpelihara atau terancam kelima hal itu dalam kehidupan manusia, maka akan terjadi ketidak harmonisan. Oleh karena itu, setiap manusia atau pemerintah dalam mewujudkan suatu hukum positif, pokok utama yang harus mendapat perlindungan hukum adalah berkaitan dengan kelima hal tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan teori tujuan Hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap keturunan (nasab).

---

<sup>13</sup>Nukman Sulaiman, Seminar Sehari tentang *Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi*, (Medan: Yaspenda Univa, 1987), hlm. 1.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Islam mensyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang shaleh, keturunan yang menjadi panutan (*dzurriyyata qurrota a'yun waj'alna lilmuttaqîna imāmā*), bukan keturunan yang lemah (*dzurriyyatan dhia'fa*). Islam juga mensyariatkan makan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*) agar manusia tidak sakit sehingga keturunannya menjadi lemah, baik fisik maupun psikis. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72:<sup>14</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

*“Dan Allah telah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu bersamanya anak-anak dan cucu-cucu serta telah memberimu rezeki dari yang baik-baik”*

Dan Nabi sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang dirawikan oleh an-Nas Ibn Malik, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

*“Menikah itu merupakan Sunnahku, maka barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah dari golonganku”*<sup>15</sup>

Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan dan orang yang menuduhnya karena keduanya merupakan kehormatan, harga diri yang perlu dilindungi dari setiap keperibadian seseorang, baik laki-laki maupun perempuan perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Dalam hal ini, Hasballah Thaib berpendapat bahwa kehormatan merupakan bagian dari iman. Oleh

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm.412

<sup>15</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Juz 2, Dar al-Fath, Kairo.1416 H. 1995 M, Hlm.107.



sebab itu, untuk mencapai kesempurnaan iman, seseorang harus melaksanakan perkawinan. Demikian juga menuduh palsu berbuat zina, dapat merusak hubungan suami-istri dari kehancuran rumah tangga. Termasuk di dalamnya perbuatan zina ini, seks melalui kekerasan, perkosaan, dan pelecehan seksual. Untuk memelihara keturunan ini, Islam memberikan sanksi hukuman yang berat dengan cara mendera kepada pelaku zina dan penuduhnya. Seperti dinyatakan Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23: <sup>16</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأُمَّهَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَالَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak ada dosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”*

Dan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Isra' ayat 32: <sup>17</sup>

<sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 120

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 429



وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٨﴾

“Dan janganlah engkau dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Demikianlah pentingnya pernikahan yang bertujuan memelihara keturunan sehingga segolongan *fuqaha*, yaitu golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan ulama Maliki *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian orang, dan mubah untuk golongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran terdapat kesusahan dirinya.<sup>18</sup>

Ketika *syariah* itu diimplementasikan di tengah masyarakat, ia dirumuskan dalam bentuk aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses legislasi ini merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Dalam konteks Indonesia, proses legislasi itu diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

## 2. Teori Konstitusi

Konstitusi dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Menurut James Bryce, konstitusi merupakan kerangka negara yg diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan : a. pengaturan

<sup>18</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), vol. II, hlm. 394.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

mengenai pendirian lembaga yang permanen, b. fungsi dari alat-alat kelengkapan dan c.hak-hak tentang yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Konstitusi merupakan dasar berdirinya suatu negara, Konstitusi adalah sumber dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara dan tugas MK adalah menegakan konstitusi, hukum dan keadilan. Pasca reformasi dan perubahan UUD 1945, konstitusi dan hukum ketatanegaraan bukan lagi sekedar objek teoritis. Akan tetapi dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi, implementasi teori dan upaya hukum tata negara telah memperoleh ladang praktik yang subur. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi menjadi lebih hidup dan berkembang. Oleh karenanya, konstitusi kini bukan lagi menjadi lantunan pasal-pasal mati yang pada umumnya selalu dijadikan sebagai pemanis kebijakan dan formalitas belaka

Mahkamah Konstitusi memang memberikan angin perimbangan yang segar, karena MK mencegah kubu legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden) menjadi terlalu kuat. Masalahnya, saat ini MK justru terlalu kuat karena dapat membatalkan undang-undang dengan mudah. Oleh karena itu, kekuatan lembaga ini juga perlu diimbangkan. Antara lain dengan memberikan kuasa bagi Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi serta melarang MK mengambil keputusan diluar permintaan penuntut. Keduanya melalui amandemen.

---

<sup>19</sup> <http://www.slideshare.net/mfitriyani1/teori-konstitusi-by-wahyu-pramesti-sh-mh> di akses tgl 16-8-2013



Terkait dengan penelitian ini MK mempunyai wewenang secara merdeka untuk menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana diajukan oleh Machicha Muchtar dan putranya yang menguji materi UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) .

### 3. Teori Perundang-Undangan

Undang-undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. Jelasnya menurut Bagir Manan,<sup>20</sup> Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara hukum.<sup>21</sup>

Teori perundang – undangan mengajarkan bahwa dalam suatu proses pembangunan atau masa transisi maka misi pokok suatu rancangan undang – undang (RUU) terletak pada penyaluran perilaku pihak yang dituju. Oleh karena itu, undang – undang berfungsi sebagai alat utama pemerintah. Suatu RUU pada dasarnya bertujuan untuk mengubah suatu

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.hlm. 24.

<sup>21</sup> Dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (*Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan pertama*), Lihat Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2009, hlm.25



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

perilaku bermasalah dengan menginstruksikan pihak yang dituju tentang bagaimana mereka harus berperilaku.<sup>22</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah, dan bertujuan. Data atau informasi yang dikumpulkan harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi, artinya data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.<sup>23</sup> Sedangkan metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>24</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal. Antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Kualitatif yaitu kesimpulannya dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) deskriptif-analisis, yaitu mengungkap isi suatu perundang-undangan dan produk hukum yang telah dipaparkan secara sistematis.<sup>25</sup> Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan menggunakan bantuan

---

<sup>22</sup> Ann Seidman dkk. diterjemahkan oleh Johaness Usfunan, *Penyusunan Rancangan Undang – Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang – Undang*, Business Advisory Indonesia University of San Francisco School of Law Indonesia Program 2002, hlm. 289

<sup>23</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, t.t.), hlm. 55.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), hlm.126

<sup>25</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Samasin, 1998) Edisi III, hlm. 159



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

bermacam-macam buku, majalah hukum , artikel hukum dan dokumen-dokumen lainnya<sup>26</sup>

Metode analisis pada tahap ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Adapun fokus utama metode analisa dari penelitian ini adalah mendiskripsikan, membahas serta mengkritisi, dari sisi materiil dan formil terhadap Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, dan fatwa MUI nomor 11 Tahun 2012.

Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>27</sup> Selanjutnya metode yang didapati dari penelitian ini adalah metode induktif. Metode Induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.<sup>28</sup> Induktif merupakan pola pikir ilmiah yang memiliki fungsi merumuskan dan menentukan masalah serta meramalkan kemungkinan jawaban masalah, sehingga fungsi pemikiran ilmiah secara induktif dalam penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi masalah serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan kerangka pemikiran induktif.

---

<sup>26</sup>Mardalis, *Metode Penelitian, (Suatu Pendekatan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara 1998), hlm. 28.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23-24.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 12-13.



Mengenai penelitian ini juga disebut penelitian *legal research* dalam penelitian ini tidak mengenal data lapangan atau dengan kata lain disebut *field research* sehingga penelitian ini hanya berfokus terhadap bahan-bahan hukum saja.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan sistematis, terkontrol, empirik dan kritis mengenai hipotesis hubungan yang diperkirakan terjadi antara fenomena alam sebagai suatu variabel tertentu dengan variabel lainnya.<sup>29</sup> Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan. Pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*Status Approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.--<sup>30</sup> Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

<sup>29</sup> Abdullah Ali, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Cirebon : STAIN Cirebon Press, 2007), hal. 53.

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Madar Maju, 2008), hlm. 92.





kesesuaian--<sup>31</sup> antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>32</sup> Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- c. Pendekatan komparatif atau perbandingan, yaitu untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara berbagai konsep atau pendapat mengenai kedudukan hukum anak yang di lahirkan di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, fatwa MUI dan keputusan Mahkamah Konstitusi RI

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber yaitu: data primer, sekunder dan tersier. *Pertama*, data hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya, yaitu berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,<sup>33</sup> dan juga dalam penelitian ini karena terkait dengan hukum Islam seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia maka dalam hal ini

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010 ), hlm. 93

<sup>32</sup> Jhonny Ibrohim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Bayumedia Publishing, 2007), hlm. , 306.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 142



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

termasuk dalam data hukum primer, untuk data ini penulis mengambil bahan hukum primer dari:

- a. UUD 1945 yang telah diamandemen
- b. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- c. Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- j. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991
- k. Fatwa MUI Nomor : 11 Tanggal 10 Maret 2012
- l. Kitab Fiqh yang terkait dengan fokus penelitian ini seperti:
  - a) Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir : Dar al-Fath, 1995), Juz 2
  - b) Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa- Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr , 2006) Juz 9.
  - c) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafii, Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2002.



Sumber data yang *kedua* adalah data hukum sekunder, data hukum sekunder merupakan data hukum yang memberikan keterangan terhadap data hukum primer dan diperoleh dengan cara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain,<sup>34</sup> berupa buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku-buku hukum<sup>35</sup> serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian tersebut, serta opini-opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sumber data yang *ketiga*, yaitu tersier, sumber data hukum tersier yakni data hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Sumber Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan :

a. Metode Studi Kepustakaan (*Bibliography Research*)

Yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 36.

<sup>35</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm, 12.



yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.<sup>36</sup>

Dari studi pustaka, dapat diketahui langsung konsep Kedudukan Hukum anak di luar perkawinan dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI serta putusan Mahkamah Konstitusi RI

b. Metode Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.<sup>37</sup>

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang menyangkut hukum perkawinan Islam di Indonesia khususnya masalah kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, Serta untuk menggunakan analisis komparatif, maka dibutuhkan juga perspektif yang baru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 serta kitab-kitab fiqh sebagai perbandingan analisis.

c. Metode Pengelolaan Sumber Data

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 55.

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm.135



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari sumbernya tersebut, serta agar data terstruktur secara baik, rapi, dan sistematis, maka pengolahan data dengan melalui beberapa tahapan menjadi sangat urgen sekaligus signifikan. Adapun tahapan pengelolaan data dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

*a. Editing*

Tahap ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian dengan relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas data dalam penelitian ini.

*b. Classifying*

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi oleh peneliti tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Hal ini untuk memberi penekanan pada tingkat prioritas data yang telah diperoleh tersebut.

*c. Analyzing*

Dengan cara menganalisis isi perundang-undangan secara konseptual yang kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.





#### *d. Concluding*

Tahap terakhir dari pengolahan data di sini adalah penyimpulan dari bahan-bahan penelitian berupa data yang telah diperoleh itu, dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitian.

Dengan kata lain teknik pengelolaan data yang dilakukan yaitu data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*Classifying*), analisis (*analysis*), penyimpulan (*Concluding*), berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Kemudian bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan tujuan dalam penelitian ini serta hal lain selayaknya dalam bab I. Hal ini untuk membatasi dalam penelitian agar tidak lepas dari tujuannya, serta mengungkap mengapa penelitian ini dilakukan serta teori dan konsep yang melatar-belakanginya.

Bab II, menguraikan kedudukan anak di luar perkawinan dan hak-haknya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini akan dideskripsikan konsep hukum anak yang sah menurut hukum positif (fiqh kompilasi).

Bab III, membahas kedudukan hukum anak di luar perkawinan menurut perspektif putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Bab IV, mendeskripsikan kedudukan anak di luar perkawinan tinjauan fatwa MUI nomor 11 tanggal 10 Maret 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Bab V Pada bab ini menguraikan analisis isi (*content analysis*) dan perbandingan (*komparatif*) terhadap Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa MUI tersebut Kemudian menyimpulkan kedudukan anak di luar perkawinan di Indonesia yang dalam undang-undang dijanjikan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (UU Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Bab IX Kedudukan anak, Pasal 43 ayat (2).

Bab VI, Penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan uraian singkat atas jawaban yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan merupakan rekomendasi peneliti guna memberikan pendapat untuk analisa hukumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, al-Majlis al-'Ala al-Andalusia li al-Da'wah al-Islamiah*, Jakarta: tanpa penerbit, 1972.

Abdul Manan, *Hukum Islam, Persoalan Masa Kini dan Harapan Masa Depan dalam Bingkai Pluralisme Bangsa*, Makalah Studium General Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 11 Desember 2010.

Abdullah Ali, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*, Cirebon : STAIN Cirebon Press, 2007.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1995

Abi Ishaq Asyatibi, *al-Muwafaqot Fi ushul al-Ahkam*, Juz II, Baerut : Dar al-Fikri, t.t.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif. 1976.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

An-Nasai, *Sunan Nasai*, Beirut: Dar Al-Mahtabah Al-Ilmiyyah, t.t.

Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

\_\_\_\_\_, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Jakarta: al-Hikmah, 2001.

Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu*, Bandung: Mulia Press, 2008.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jikid I* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: TSAbitA, 2008.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1989.

Jaih Mubarak, *Hukum Islam Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Bandung,: Benang Merah, 2006.

Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

\_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM Unisba: 1995.

\_\_\_\_\_, *Teori-teori Hukum; Suatu Telaah Perbandingan dengan Perbandingan Filsafat*, Bandung: Pascasarjana UIN, 2009.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

M. Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, Mimbar Hukum No. 4 tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991.

\_\_\_\_\_ dan Khairuddin Nst (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hal.1

M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memposisikan Abetraksi Hukum Islam*, Mimbar Hukum, No. 5 Tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1992.

Moh. Mahfud, MD, *Perkembangan Politik Hukum*, Yogyakarta: Gama Media, 1993.

\_\_\_\_\_, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

\_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.2010

Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan, 2008.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon STAIC Press, 2010

-----, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta : Pustaka Dinamika, 2009

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafii, Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2002.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005.

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta,

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta; Penamadani, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

-----, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1979.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid-7, Bandung: al-Ma'arif, 1994.

Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.

Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transpormasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.

Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## B. INTERNET

Citra Widi Widiyawati dkk, Implikasi Putusan Mk Nomor 46//PUU-VII/2010 Mengenai Pengakuan Secara Hukum Hubungan Perdata Terhadap Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. ([Http://Kspprincipiumfhuns.Blogspot.Com](http://Kspprincipiumfhuns.Blogspot.Com), diakses tanggal 6 Desember 2012)

Chatib Rasyid, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mk No. 46/PUU-VII/2012. ( [http ://www.ptatSemarang.go.id](http://www.ptatSemarang.go.id), diakses tanggal 6 Desember 2012)

A.Mukti Arto , Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya. ( <http://www.pa-Salatiga.go.id>, diakses tanggal 6 Desember 2012 )